



LAPORAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PERIODE BULAN JULI s.d SEPTEMBER TAHUN 2025
(TRIWULAN III)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI



-  **+62 821-8076-5383 (PATIN)**
-  **Ptun Jambi**
-  **ptun_jambi**
-  **ptun-jambi.go.id**
-  **pengadilantunjambi@gmail.com**

Jalan Kol M. Kukuh No.1 Paal Lima Kota Baru



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI**

JL. KOL M. KUKUH NO. 1 KOTABARU TELP. (0741) 41986 FAX. (0741) 41986

JAMBI – 36128

Email : ptsp@ptun-jambi.go.id

www.ptun-jambi.go.id

Jambi, 1 Oktober 2025

Nomor : 493/KPTUN.W5-TUN3/HK2.7/X/2025
Lampiran : 11 (sebelas) Lembar
Perihal : Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi
Periode bulan Juli s.d September 2025

Kepada Yth.

**Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara**

**Cq. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan
Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara**

Di -

JAKARTA

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi periode bulan Juli s.d September 2025 (Triwulan III).

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat menjadi bahan pendataan dan atas perhatian kami mengucapkan terima kasih.

KETUA

NEKO YULIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, di Palembang.
2. Arsip.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT., telah disusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bulan Juli s.d. September 2025 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan survei persepsi korupsi kepada pengguna layanan pengadilan. Dalam survei ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa melakukan tatap muka. Survei dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survei maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujud wilayah bersih korupsi.

Demikian laporan survei persepsi korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bulan Juli s.d. September 2025 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 30 September 2025

Mengetahui
Ketua PTUN Jambi

PPID,



EKO YULIANTO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yoshinta Mage', is written on the page.

YOSHINTA MAGE

DAFTAR ISI

BAB I4

PENDAHULUAN.....4

1.1. Latar Belakang.....4

1.2. Maksud Dan Tujuan.....4

1.3. Rencana Kerja.....5

BAB II6

METODOLOGI.....6

2.1. Metode Penelitian.....6

2.2. Populasi Dan Sampel6

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....6

2.4. Teknik Pengumpulan Data.....7

2.5. Teknik Analisis Data.....7

2.6. Tahapan pelaksanaan.....7

BAB III.....9

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI.....9

3.1. Profil responden9

3.2. Indeks persepsi anti korupsi.....10

BAB IV.....11

PENUTUP11

4.1. Kesimpulan.....11

4.2. Rekomendasi11

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berperan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Rencana Kerja

1.3.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan:
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data:
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal:
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.3.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.3.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di satuan kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 10 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 6. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 6 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 6 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 6 yang artinya mendekati nilai 6 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang Lingkup Survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Gratifikasi
2	Pungutan Liar (pungli)
3	Percaloan
4	Diskriminasi
5	Transparansi Informasi

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.50	16.67 – 25.00	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.51 – 3.00	25.17 – 50.00	2	Kurang bersih dari korupsi
3	3.01 – 4.50	50.17 – 75.00	3	Cukup bersih dari korupsi
4	4.51 – 6.00	75.17 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan sebanyak 40 (Empat Puluh) Responden memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No	Responden	Total	Jumlah Pembulatan Responden (%)
1.	< SLTP	0	0%
2.	SLTA	12	30%
3.	S1	20	50%
4.	S2 >	8	20%
	Total	40	100%

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan sebanyak 40 (Empat Puluh) Responden memperoleh gambaran bahwa dari jenis pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No	Responden	Total	Jumlah Pembulatan Responden (%)
1.	PNS/TNI/POLRI	6	15%
2.	Pegawai Swasta	6	15%
3.	Pelajar/Mahasiswa	6	15%
4.	Advokat/Pengacara	14	35%
5.	Lainnya	8	20%
	Total	40	100%

3.1.3. Kelompok usia responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan sebanyak 40 (Empat Puluh) Responden memperoleh gambaran bahwa dari usia responden sebagai berikut:

Tabel 6.
Usia responden

No	Responden	Total	Jumlah Pembulatan Responden (%)
1.	< 30 Tahun	14	35%
2.	31-40 Tahun	14	35%
3.	41-50 Tahun	6	15%
4.	50 > Tahun	6	15%
	Total	40	100%

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Hasil Survei yang dilakukan Terhadap 40 Responden, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	Tingkat Kepuasan Publik						Nilai rata-rata	Kategori
		Sangat Setuju Sekali *****	Sangat Setuju *****	Setuju ****	Kurang Setuju ***	Tidak Setuju **	Sangat Tidak Setuju *		
1.	Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan	37	3	0	0	0	0	5,93	Bersih dari korupsi
2.	Tidak Ada Kecurangan Pelayanan	39	1	0	0	0	0	5,98	Bersih dari korupsi
3.	Tidak Ada Imbalan Uang/Barang/Fasilitas di luar ketentuan	38	2	0	0	0	0	5,95	Bersih dari korupsi
4.	Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)	38	2	0	0	0	0	5,95	Bersih dari korupsi
5.	Tidak Ada Percaloan / Perantara Tidak Resmi	38	2	0	0	0	0	5,95	Bersih dari korupsi
Jumlah		190	10	0	0	0	0	-	-
Persentase		95%	5%	0%	0%	0%	0%		
Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi 5,95 (99,16%)									

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi memiliki **Indeks Persepsi Anti Korupsi 5,95 atau masuk pada kategori 99,16% (Bersih dari Korupsi).**

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 bulan Juli s/d September sudah sangat baik namun terdapat saran atau masukan yaitu:

1. Agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi terus menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen anti korupsi;
2. Agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi terus memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk mencegah segala bentuk korupsi dalam pelayanan;
3. Perlu adanya pengawasan dan perhatian yang konsisten agar pelayanan diberikan secara adil dan setara tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa.